

PERANCANGAN SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BERBASIS ANGGARAN KINERJA PADA KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

Abdullah Saifuddin
STMIK Tidore Mandiri
oeyhahs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan mengingat issue Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Penggunaan sistem informasi akuntansi anggaran tradisional dirasa tidak relevan lagi dalam tuntutan perkembangan keuangan publik yang sangat kompleks. Anggaran tradisional perlu diganti dengan sistem informasi akuntansi anggaran berbasis kinerja, mengingat anggaran kinerja memiliki tolok ukur yang relevan dan mampu menjawab ukuran-ukuran kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan Penerimaan Kas yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pusat, dan Pendapatan lain-lain yang sah telah memenuhi prosedur dari sistem informasi akuntansi berbasis anggaran kinerja terlihat melalui penggunaan dokumen, prosedur penerimaan uang, dan fungsi yang terlibat dari penerimaan uang tersebut. Sedangkan pada pengeluaran kas melalui prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang terdiri dari prosedur penerbitan SKO, prosedur pengajuan SPP, prosedur penerbitan SPM, prosedur pengeluaran kas, prosedur pengesahan SPJ, dan prosedur pencatatan akuntansi.

Kata Kunci : *sistem informasi akuntansi, anggaran kinerja, penerimaan dan pengeluaran kas*

I. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah: perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan, perubahan prinsip pengelolaan penganggaran, perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman, defisit spending dan perubahan strategi pembiayaan. Perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incrementalism* kepada anggaran yang bersifat anggaran kinerja (*performance budget*).

Perubahan struktur anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Tentunya sejalan dengan otonomi daerah tersebut, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

Penulis tertarik untuk mempelajari tentang sistem informasi akuntansi berbasis anggaran kinerja yaitu dengan menelaah lebih jauh tentang arus penerimaan kas dan arus pengeluaran kas. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian dengan judul “ Perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran kas berbasis anggaran kinerja pada kantor gubernur Provinsi Maluku Utara”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi Pengawasan Kas

Pedoman untuk pengawasan terhadap kas (Baridwan, 2000:87) sebagai berikut :

a. Penerimaan kas

Penerimaan kas dalam suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa sumber antara lain dari penjualan tunai, penulisan piutang atau dari pinjaman. Prosedur-prosedur pengawasanyang dapat digunakan antara lain :

1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor kebank.
2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan .
3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas.

b. Pengeluaran kas

Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan itu adalah untuk membayar bermacam-macam transaksi. Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan ketat, seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya digelapkan.

Beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah sebagai berikut :

1. Semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran dibayar dari kas kecil.
2. Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat.
3. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang lengkap atau didengan kata lain digunakan system voucher.
4. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas.
5. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu.
6. Diharuskan membuat laporan kas harian

B. Sistem Informasi Akuntansi berbasis Anggaran Kinerja

Menurut sjahrudin rasul dalam bukunya tentang pengintegrasian kinerja dan anggaran dalam perpektif UU No.17/2003 tentang keuangan negara (2003 : 49) mendefenisikan anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengkaitkan pendapatan pendanaan program dan produksi sedangkan lanjutan bahwa anggaran kinerja merupakan suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada hubungan antara uang yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang diharapkan dimana keunggulannya yaitu fokus pada hasil-hasil, lebih fleksibel, lebih dapat dievaluasi mempermudah pengambilan keputusan dan perspektif jangka panjang.

III. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui sejauh mana Siistem Informasi Akuntansi pada kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara, maka penelitian ini menggunakan metode analisis :

- a. Metode analisis deskriptif untuk menjelaskan pengendalian intern yang terkandung dalam Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Anggaran Kinerja pada kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara.

- b. Metode analisis komparatif dengan membandingkan konsep Sistem Penerimaan dan Pengeluaran kas Berbasis Anggaran Kinerja, dengan yang diterapkan pemerintah Propinsi Maluku Utara dan sebaiknya menurut teori.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas

Sistem Penerimaan kas terbagi atas :

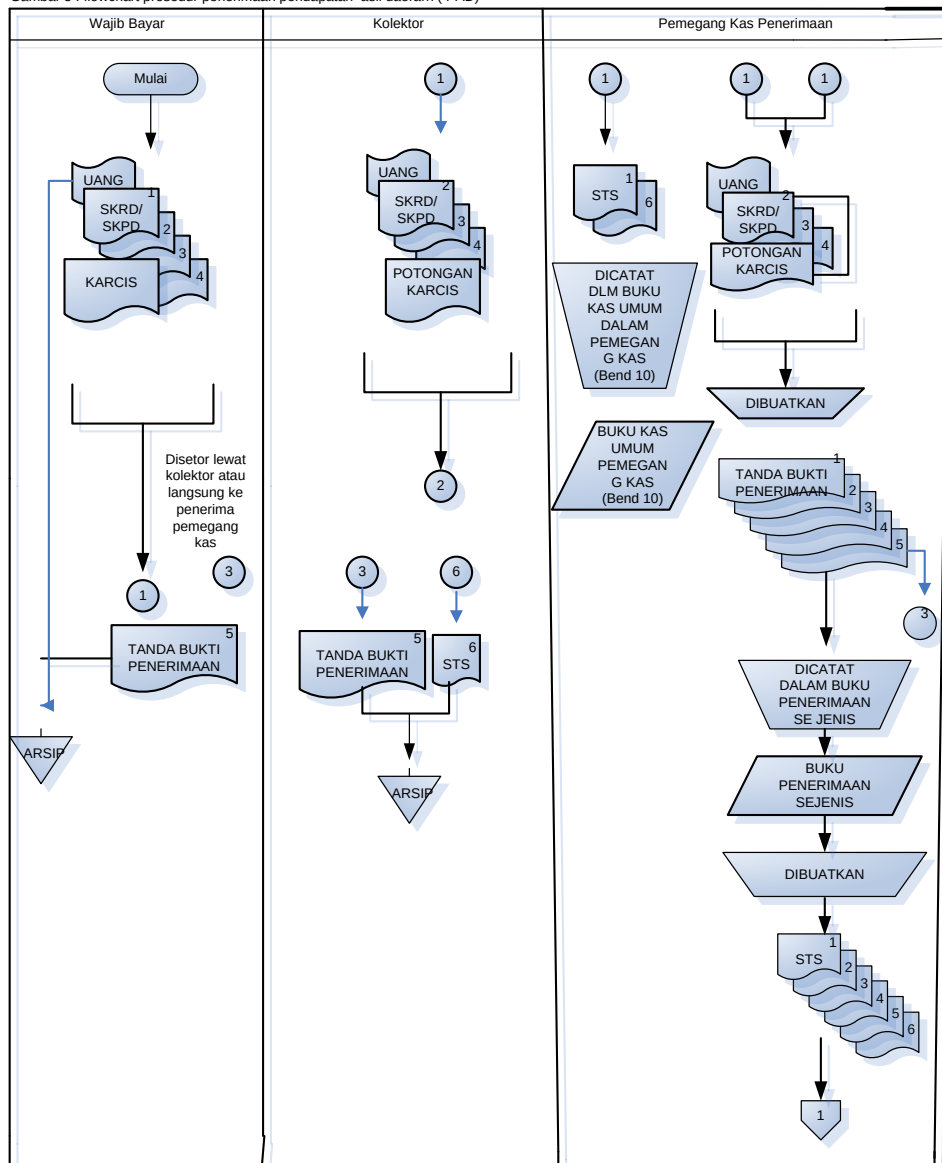
1. Sub sistem penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Sub sistem penerimaan dana perimbangan.
3. Sub sistem penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

B. Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

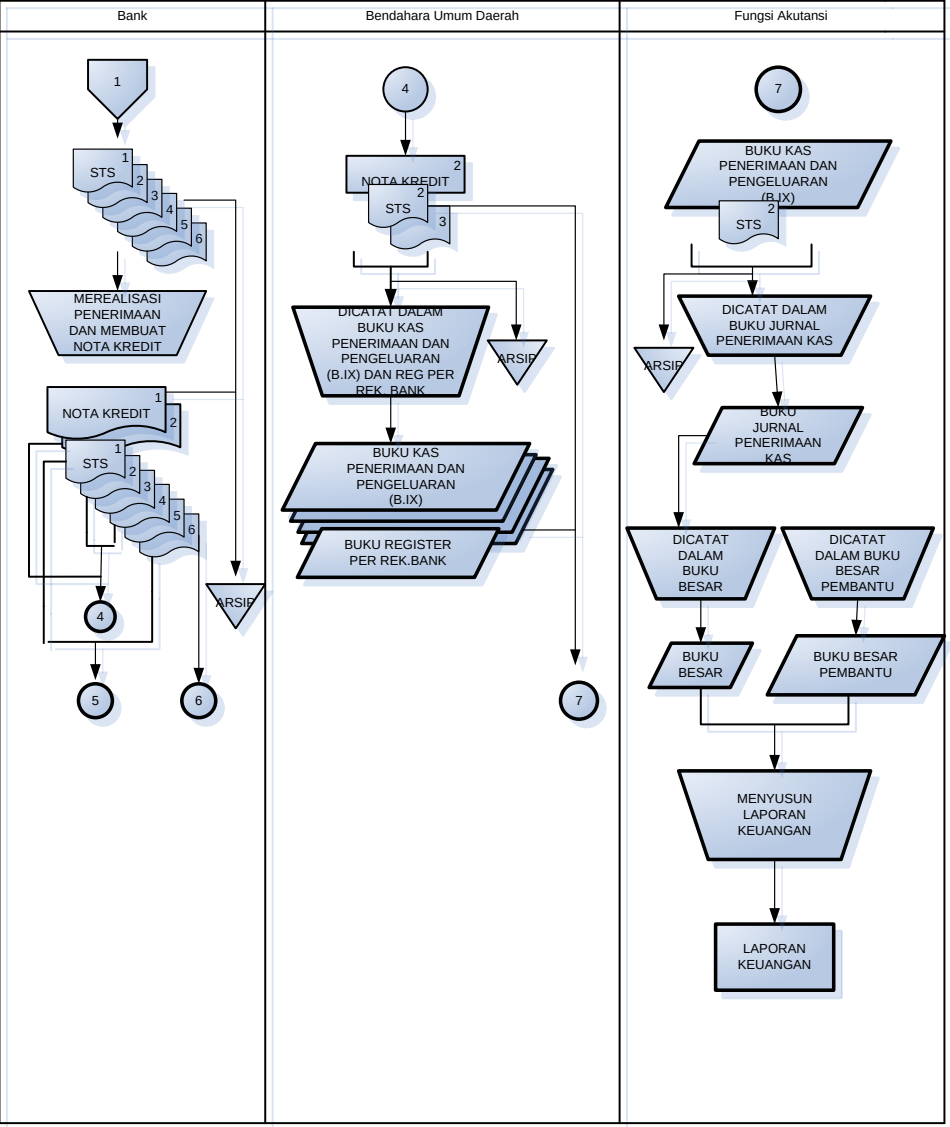
Penerimaan kas daerah yang berasal dari PAD pemerintah propinsi maluku utara

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan jasa giro, dan penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Gambar 5 : flowchart prosedur penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)



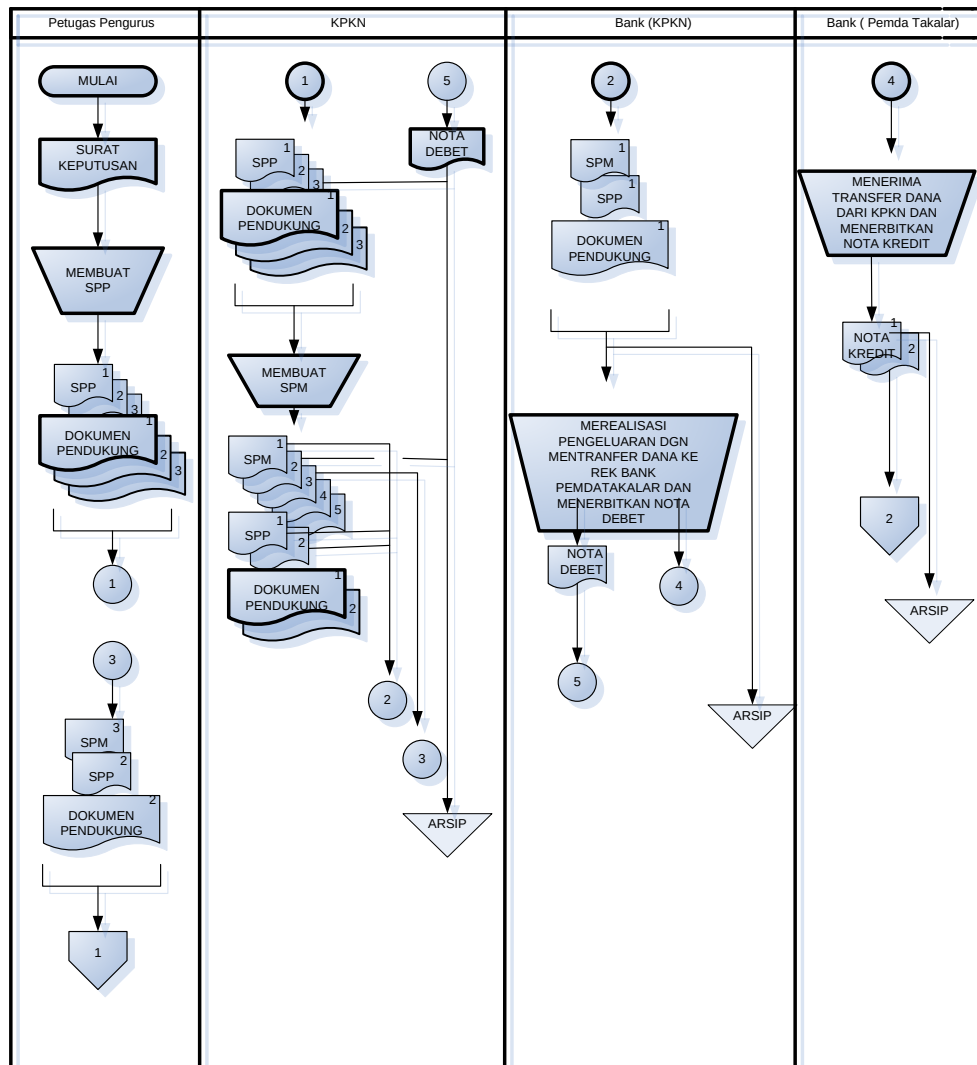
Gambar 5 : flowchart prosedur penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)



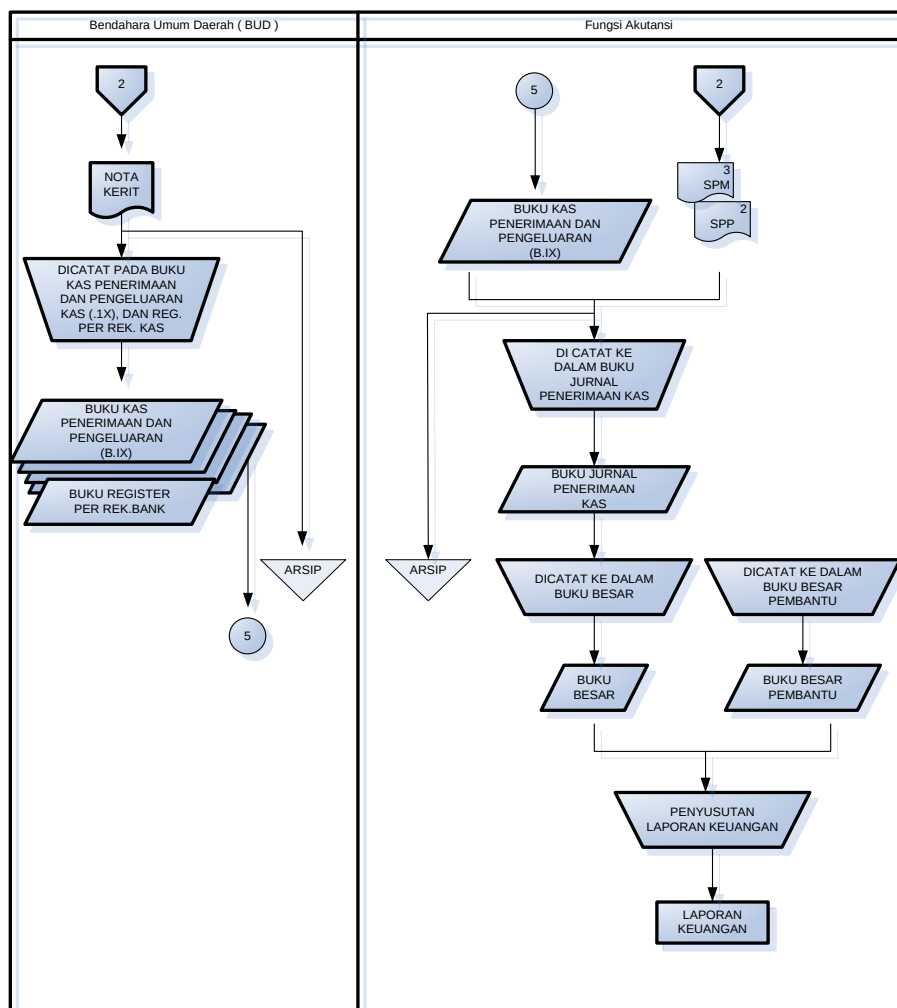
C. Sub Sistem Penerimaan Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat

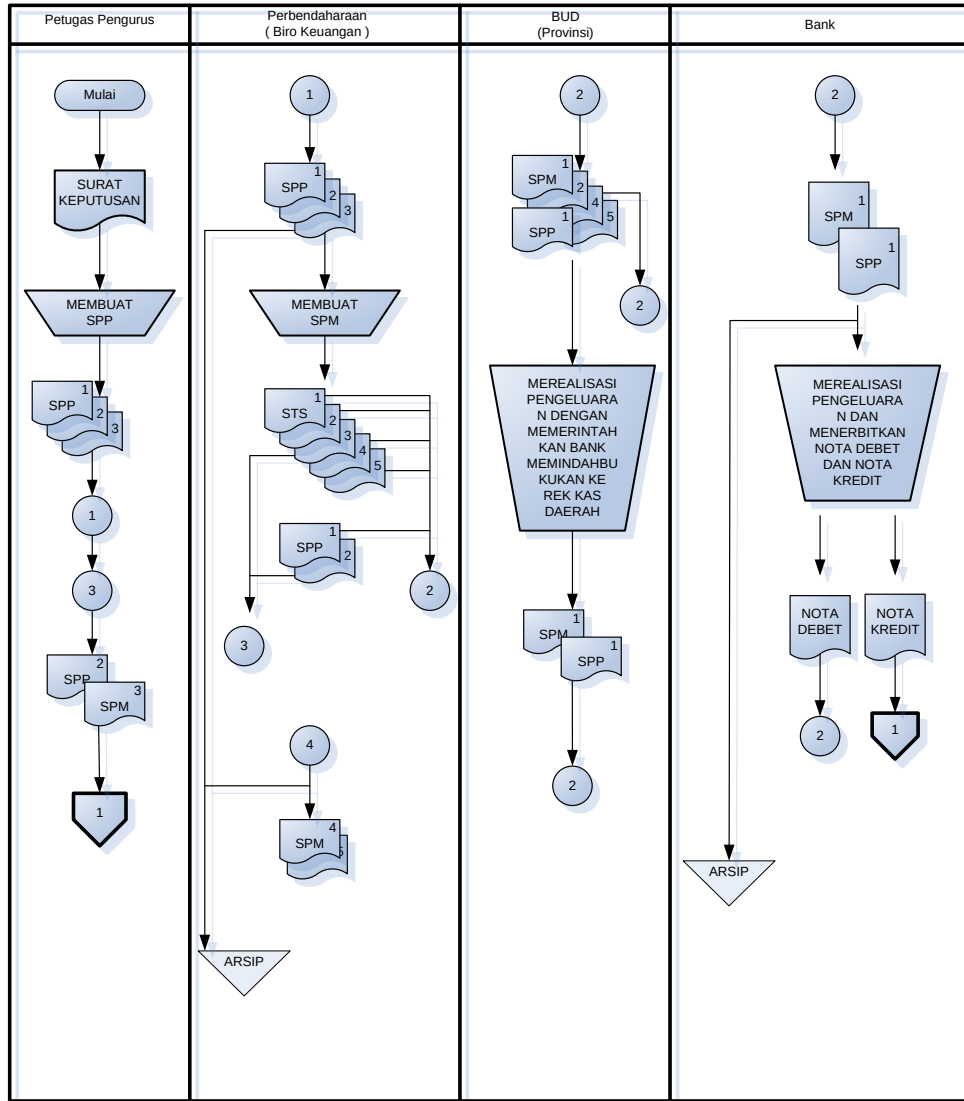
Gambar 6 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari pemerintah pusat



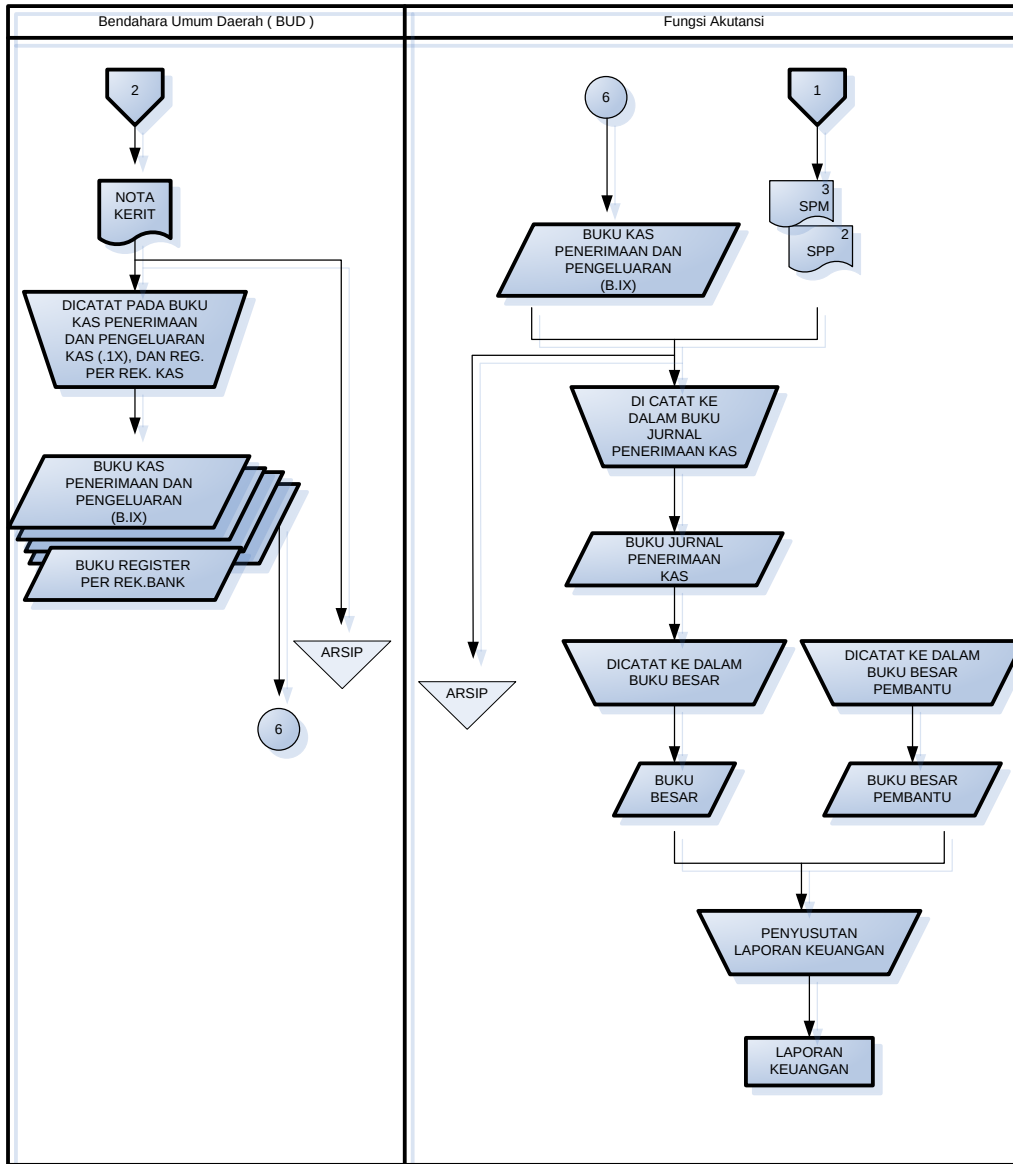
Sambungan Gambar 6 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari pemerintah pusat



Gambar 7 : flowchart Prosedur Penerimaan Dana Perimbangan Dan Penyeimbang dari Pemerintah Provinsi



Sambungan Gambar 7 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari pemerintah provinsi



D. Sub sistem Penerimaan Lain-lain pendapatan yang sah

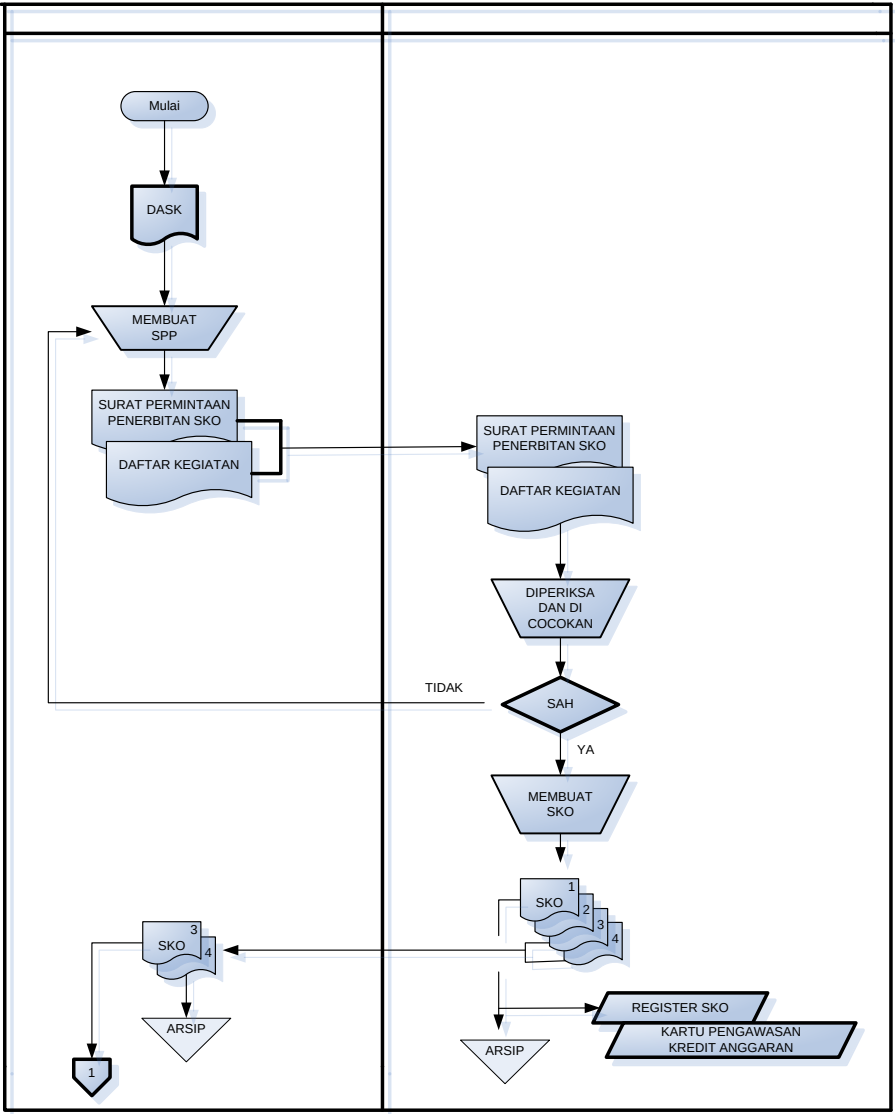
Penerimaan Kas daerah Pemda Propinsi Maluku Utara yang dianggarkan pada tahun 2018 yang berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas:

- Penerimaan Jasa Giro
- Penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan

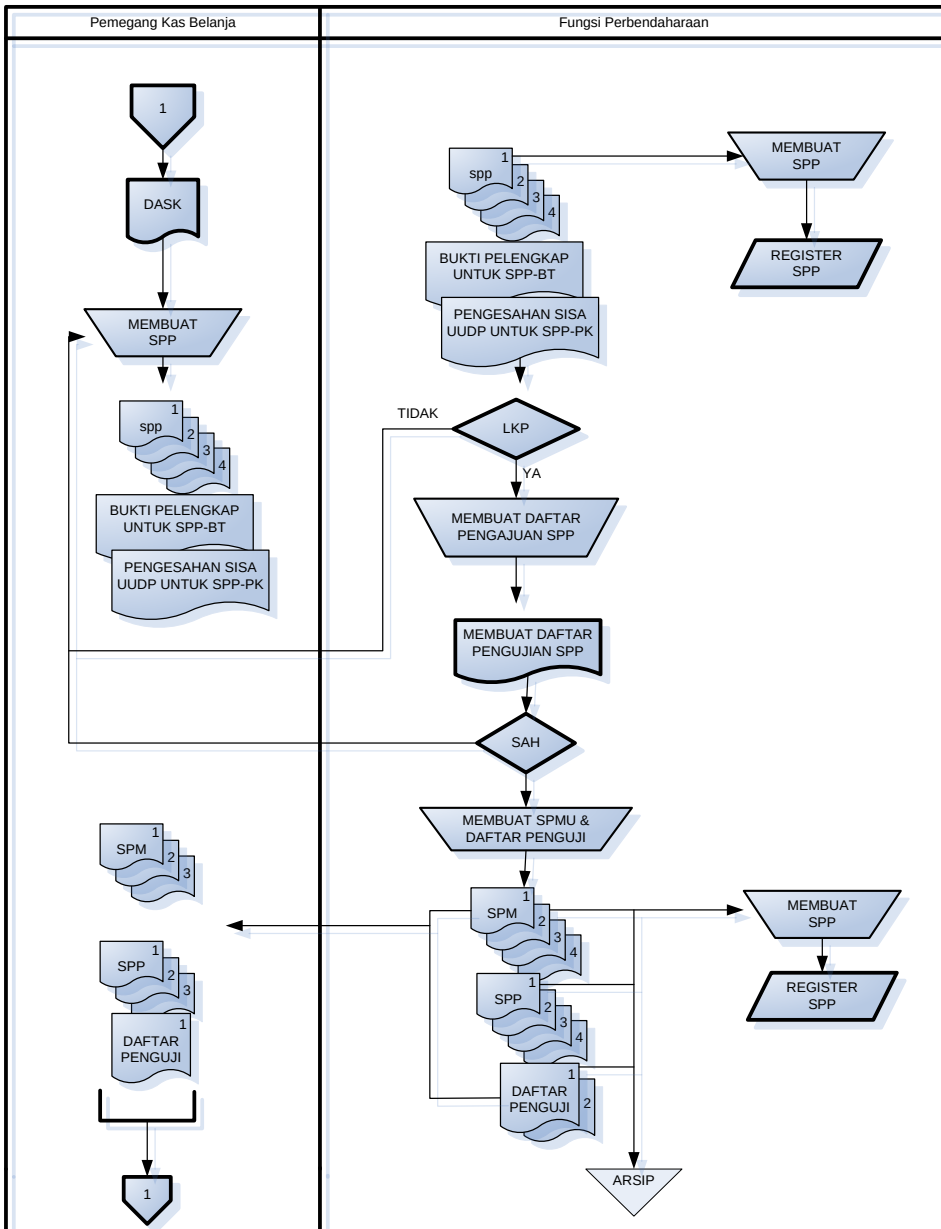
Adapun mengenai Pihak/unit terkait, Dokumen atau Formulir serta prosedur sama halnya Penerimaan dari PAD.

E. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas berbasis Anggaran Kinerja

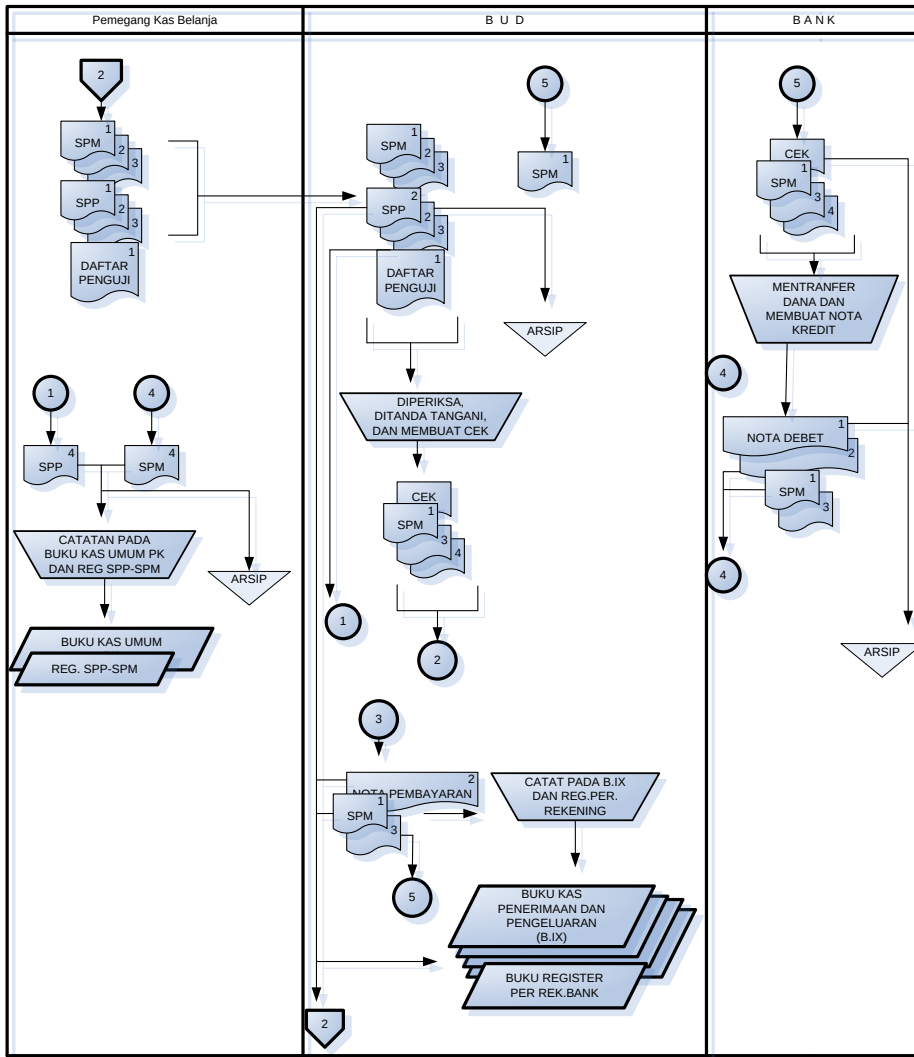
Gambar 8 : flowchart prosedur penerbitan SKO



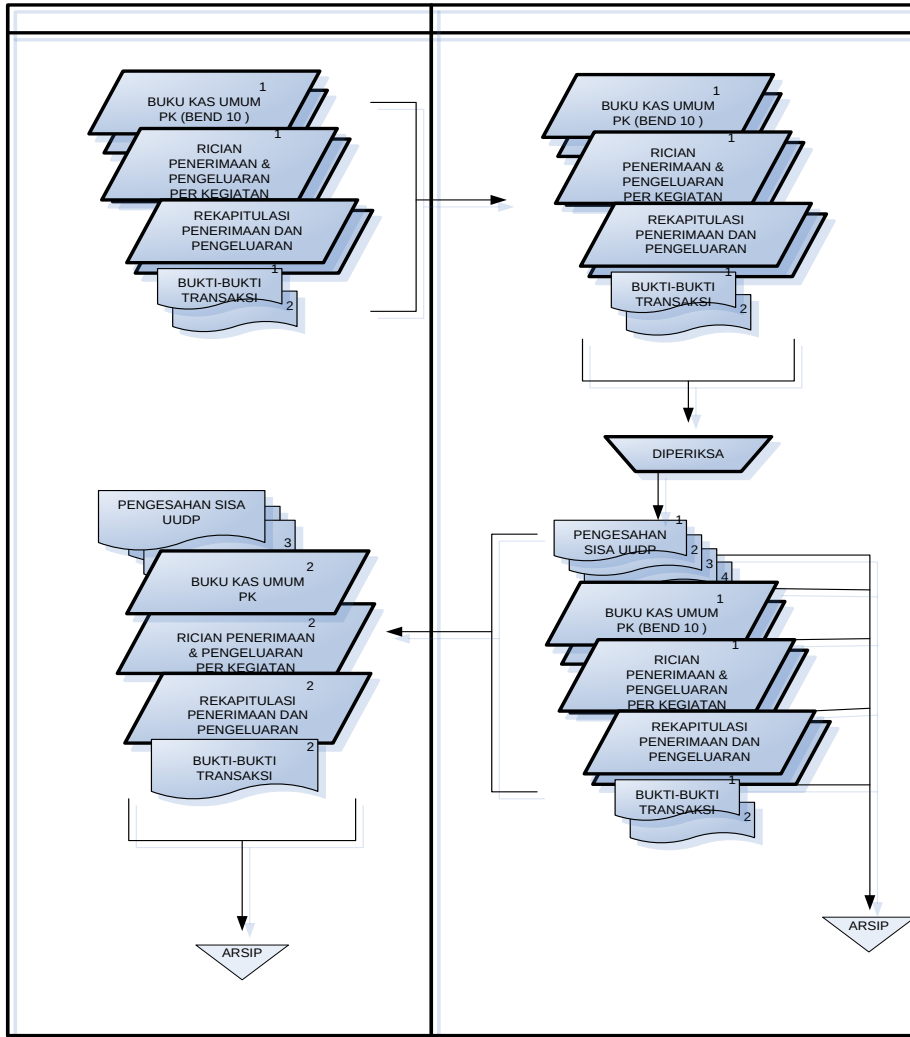
Gambar 9 : Flowchart Prosedurt Pengujian SPP Dan Penerbitan SPM



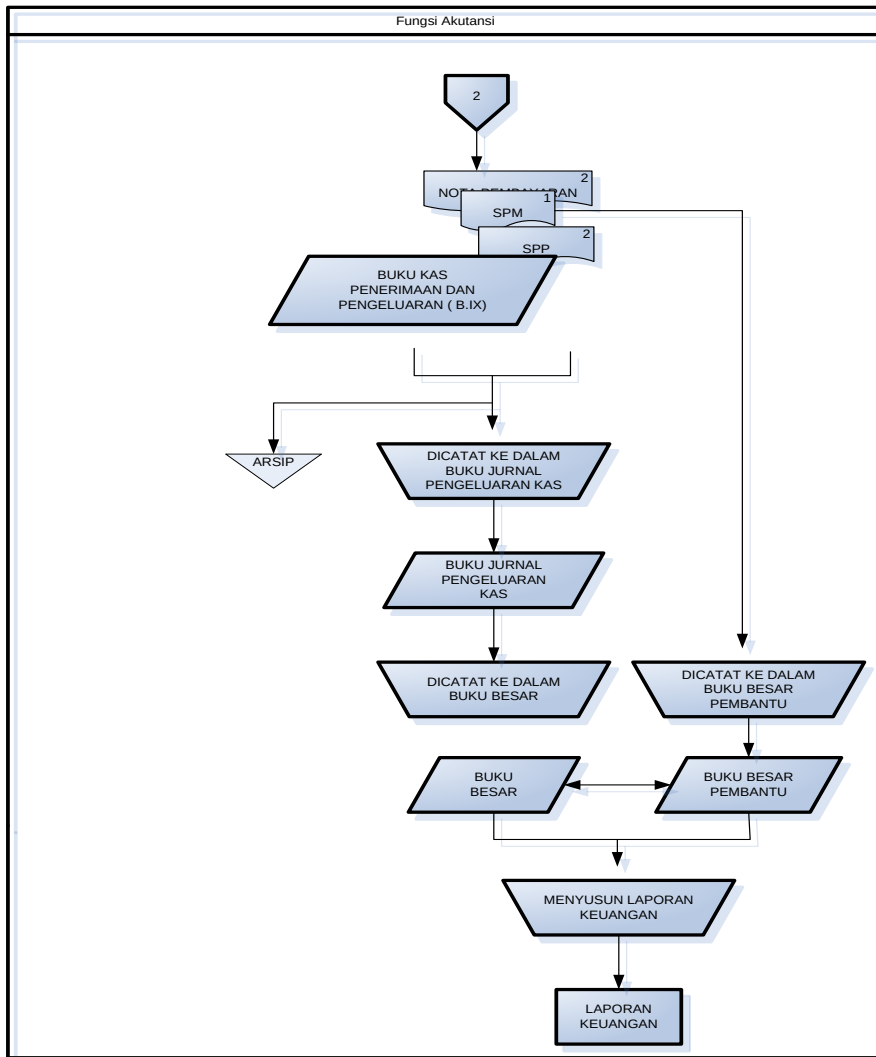
Gambar 10 : flowchart prosedurt Pengeluaran Kas



Gambar 11 flowchart Prosedur pengesahan SPJ atas Pengisian Kas



Gambar 12 : flowchart Prosedur Pencatatan Akutansi



V. KESIMPULAN

Menggunakan format Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dimana Penerimaan Kas yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pusat, dan Pendapatan lain-lain yang sah telah memenuhi prosedur dari system informasi Akutansi baik itu menyangkut Penggunaan dokumen, prosedur penerimaan uang, dan fungsi yang terlibat dari penerimaan uang tersebut. Sedangkan pada pengeluaran kas melalui prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan membentuk suatu system yang terdiri dari prosedur penerbitan SKO, prosedur pengajuan SPP, prosedur penerbitan SPM, prosedur pengeluaran kas, prosedur pengesahan SPJ, dan prosedur pencatatan akutansi. Berdasarkan uraian dimaksud Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara menggunakan model pencatatan *accrual basic*, ini dapat dilihat yaitu pada akhir tahun anggaran dimana laporan surplus/defisit telah dibuat, sebab pengukuran kinerja yang dimaksud oleh Undang-Undang No.17 Tentang Keuangan Negara bahwa anggaran kinerja dilihat dengan menilai laporan keuangan perusahaan khususnya laporan surplus defisit.

REFERENSI :

- [1] Baridwan, Zaki. 1993. **Sistem Akuntansi**, Bagian penerbitan Akademik Akuntansi Yogyakarta, YPKN.
- [2] Baridwan, Zaki. 2000. **Sistem Informasi Akuntansi**. Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE
- [3] Baridwan, Zaki. 1992. **Intermediate Accounting**, Edisi Ketujuh. Yogyakarta, BPFE
- [4] Bastian, Indra. 2001. **Manual Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta, BPFE.
- [5] Bastian, Indra,. Soepriyanto, Gatot. 2003. **Sistrem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat.
- [6] George H Bodnar. Williams S Hopwood. 2000. Diindonesiakan oleh Abadi Jusuf, Amir. Tambunan, Rudi M. **Sistem Informasi Akuntansi**, Pearson Education Asia Pte.Ltd.Prentice-Hall.Inc. Jakarta, Salemba Empat.
- [7] Halim, Abdul. 2002, **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat.
- [8] Jay M Smith. K fred Skousen. 1996. **Akuntansi Intermediate volume komprehensif**, Edisi kesembilan jilid 1, Ciaracas Jakarta, Erlangga.
- [9] Perum percetakan Negara Republik Indonesia. 2003. **Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**, Pedoman dan modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Jakarta.
- [10] Rasul, Sjahruddin. 2003. **Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Perpektif UU No.17/2003 tentang keuangan Negara**, cetakan pertama, Jakarta, seri Hukum.
- [11] SR, Soemarso. 1990. **Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga, Jakarta, Rineka cipta.
- [12] Widjaja Tunggal, Amin. 1995. **Struktur Pengendalian Intern**, Edisi Pertama, Jakarta, Rineka Cipta.